

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi ini, perkembangan akuntansi sektor publik, Khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang sangat kuat dan mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan.

Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah. Keuangan daerah merupakan dokumen publik yang berhak diketahui oleh masyarakat. Pemerintah daerah wajib mempublikasikan setiap laporan keuangan daerah kemasyarakat. Empat laporan keuangan yang wajib dipublikasikan adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun untuk melihat efisiensi dan efektivitas (*value for money*) dari pemerintah daerah, maka kita dapat melihat kinerjanya melalui laporan realisasi anggaran.

Dalam laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislative dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan realisasi anggaran terdiri atas beberapa elemen (pos) utama yaitu: Pendapatan, Transfer, belanja, surplus/devisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Laporan realisasi anggaran merupakan jenis laporan keuangan daerah yang lebih dahulu dihasilkan sebelum kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintah merupakan tulang punggung (*back-bone*) penyelenggaraan pemerintahan. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu laporan realisasi anggaran menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang jujur, demokrasi, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel,

Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah salah satu daerah tingkat dua yang berada di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki luas wilayah seluas 3.947 km persegi, dengan total penduduk sekitar 404.426 jiwa. Kabupaten Timor Tengah Selatan terdiri dari : 21 kecamatan, 12 kelurahan, 207 desa. Secara geografis, posisi Kabupaten Timor Tengah Selatan terletak pada 9'26' - 10'10' Lintang Selatan 124'49'01" - 124'04'00" Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Timor Tengah Utara Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu, Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Kupang Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Timor.

analisis rasio keuangan terhadap pendapatan dan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah pengakuntansiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta. Berikut adalah tabel Realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun anggaran 2013-2015.

Dalam laporan realisasi anggaran, pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Total Pendapatan pada pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2013 sebesar Rp.838.702.123.645,50 pada tahun 2014 total pendapatan sebesar Rp.920.739.659.117,10 dan pada tahun 2015 total pendapatan sebesar Rp.1.075.717.057.485,74 sedangkan belanja pemerintah kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2013 sebesar Rp.825.665.890.451,00 dan pada tahun 2014 sebesar Rp.826.584.424.153,00 dan pada tahun 2015 belanja pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar Rp.918.703.018.649,00.

Selanjutnya macam-macam pajak yang dipungut di daerah Kabupaten/Kota yang menjadi sumber pendapatan daerah Kabupaten/Kota tahun 2013-2014 sedangkan pada tahun 2015 tidak dirincikan pendapatan pajak.

Sumber-sumber pendapatan kabupaten Timor Tengah Selatan

No	Keterangan	Anggaran 2013	Realisasi 2014
1	Pajak hotel dan restoran	38.196.000,00	45.663.600,00
2	Pajak hiburan	524.980.000,00	980.504.705,00
3	Pajak reklame	8.700.000,00	10.686.200,00
4	Pajak penerangan jalan	123.500.000,00	159.033.763,00
5	Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan	825.500.000,00	1.406.545.422,00
6	Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan	3.541.600.000,00	3.393.953.324,00
7	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	70.000.000,00	145.613.450,00
	Jumlah	5.140.976.000,00	6.142.000.464,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.TTS

Analisis pendapatan dan belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara Ekonomis, Efisiensi, dan Efektif. Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran.

Dengan otonomi dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan Efisiensi penyediaan barang publik dan regulasi lokal sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik dan produktivitas ekonomi daerah semakin meningkat. Berkaitan peran tersebut, maka peran optimalisasi pendapatan dan belanja daerah akan mempengaruhi pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Dengan memperhatikan keadaan pemerintah daerah, maka penulis tertarik untuk mengemukakan masalah dalam menganalisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul **“Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013-2015”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sudah ekonomis, efisien, dan efektif (*value of money*) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value of money*).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Secara teoritis, memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akademis secara kritis yang berhubungan dengan keuangan daerah khususnya mengenai pendapatan dan belanja dimasa yang akan datang.
2. Secara Praktis, dalam hal ini memberikan bahan masukan dalam menentukan kebijakan dan strategi khusus mengenai pendapatan dan belanja.